

**EFEKTIVITAS PENDATAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN
PELEPAT ILIR KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI**

SEPTY RIANI

NPP.29.0373

Asdaf Jambi

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email : rianiseptyyy@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The Family Hope Program (PKH) is one of the social protection programs in Indonesia in the form of social assistance. **Purpose:** To provide an explanation of data collection and validation of recipients of the Family Hope Program (PKH) social assistance in improving the welfare of the people of Pelepat Ilir District, Bungo Regency P2KB and P3A Bungo Regency. **Methods:** This research is a qualitative descriptive approach with data collection techniques carried out by interview, observation, and documentation techniques, then the data analysis process is carried out by reducing data, presenting data, and drawing conclusions/verification. **Results:** Based on the results of research on the effectiveness of data collection on the Family Hope Program (PKH) in improving the welfare of the people of Pelepat Ilir District, Bungo Regency, there are still obstacles that make the implementation of these activities less effective. **Conclusion:** Experts in the field have made the implementation of PKH data collection not yet effective. The efforts of the Social Service, family planning population control, women's empowerment and child protection in carrying out roles related to the collection of hope family program data in improving the welfare of the people of Pelepat Ilir District, Bungo Regency for now are by optimizing expert human resources in the field, namely recruiting their own direct assistant officers. PKH data collection in the field to assist data collection activities and independently handle privately owned facilities owned by officers, either by using computers, laptops or cellphones which are deemed to be able to assist the task of data collection activities for the Family Hope Program (PKH) in the Pelepat Ilir District. those in the field when met by the author, mostly use privately owned facilities.

Keywords: Effectiveness, Data Collection, PKH, prosperous

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu di mana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). **Tujuan:** Untuk memberikan penjelasan tentang pendataan serta validasi penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang terjadi dalam pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Dinas Sosial, P2KB dan P3A Kabupaten Bungo. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian proses analisa data dilakukan dengan cara mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian efektivitas pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo masih mengalami hambatan yang membuat pelaksanaan kegiatan tersebut kurang berjalan efektif. **Kesimpulan:** Pelaksanaan pendataan PKH yang masih kurang fasilitas sarana dan prasarana serta terbatasnya sumber daya manusia yang ahli di lapangan membuat implementasi pendataan PKH belum berjalan efektif. Upaya Dinas sosial, pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam melaksanakan peran terkait pendataan program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo untuk saat ini adalah dengan mengoptimalkan sumber daya manusia ahli di lapangan, yaitu merekrut sendiri langsung asisten petugas pendataan PKH di lapangan untuk membantu kegiatan pendataan dan menanggulangi secara mandiri fasilitas milik pribadi yang dimiliki oleh petugas, baik dengan menggunakan komputer, *laptop* ataupun *handphone* yang dirasa dapat membantu tugas kegiatan pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Kecamatan Pelepat Ilir. Banyak petugas pendataan yang di lapangan ketika ditemui oleh penulis, kebanyakan menggunakan fasilitas milik pribadi.

Kata Kunci: Efektivitas, Pendataan, PKH, Kesejahteraan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya program sosial dalam mencapai kesejahteraan masyarakat masih cukup banyak yang belum mampu berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Efektif atau tidaknya suatu program untuk membangun kesejahteraan ini membutuhkan kerjasama

yang terkoordinir dengan baik antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat untuk hal ini merupakan tanggung jawab Kementerian Sosial Republik Indonesia memiliki berbagai kebijakan program untuk dapat membantu masyarakat dengan ekonomi rendah.

Persentase penduduk miskin Indonesia dari tiga tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 10,64 % per maret 2017 menjadi 9,22 % per september 2019 dengan jumlah 24,79 juta penduduk. Persentase kemudian, meningkat pada maret 2020 sebesar 0,46 % menjadi 9,78 % dengan 26,42 juta penduduk.

Salah satu program bantuan sosial masyarakat ekonomi rendah dalam upaya mengetaskan kemiskinan di Indonesia adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program pemberian bantuan bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Bersama dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH), Keluarga Miskin (KM) dibantu untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi yang diharapkan dapat membantu beban dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat ekonomi rendah di Indonesia.

Tabel 1

Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH

NO	KABUPATEN/KOTA	KPM/PKH
1	Batang Hari	9.673
2	Bungo	7.065
3	Kerinci	10.660
4	Kota Jambi	14.563
5	Kota Sungai Penuh	2.173
6	Merangin	11.036
7	Muaro Jambi	9.674
8	Sarolangun	9.463
9	Tanjung Jabung Barat	10.863
10	Tanjung Jabung Timur	7.511
11	Tebo	9.467
	Jumlah	102.148

Sumber: Data diolah PKH Kemensos, 2020

Realisasi pemberian bantuan sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah membatasi bantuan yaitu empat orang dalam satu keluarga. Target penerima PKH merupakan dua komponen dalam keluarga, maksudnya yang termasuk dalam komponen keluarga pertama yaitu, ibu hamil, anak usia dini, keluarga lansia, dan disabilitas, sedangkan komponen lainnya yaitu, bantuan bagi pendidikan keluarga PKH bagi anak yang berusia sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Bungo sebagai wujud dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan bantuan akses kebutuhan dasar bagi Keluarga Miskin (KM) masih memiliki permasalahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan di Kabupaten Bungo. Proses pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) nyatanya masih menemukan beberapa permasalahan dalam proses pelaksanaannya. Pada pelaksanaan pendataan Program Keluarga Harapan oleh Dinas sosial P2KB dan P3A Kabupaten Bungo dijelaskan bahwa terbatasnya ketersediaan server data sosial yang merupakan sistem layanan komputer yang digunakan untuk olah data melalui SIKS-NG baik yang dilakukan secara *offline* maupun *online* karena pendataan melalui SIKS *offline* masih mengalami kendala pada operator sistem yang terbatas yang disebabkan kurangnya pelatihan bimbingan teknologi operator di tingkat desa dan kelurahan sehingga kekurangan SDM di lapangan. Anggaran yang terbatas untuk penyelenggaraan pendataan Program Keluarga Harapan karena *recofusing* anggaran pemerintah daerah dan tahap identifikasi akhir dinas sosial, pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terkait juga terkendala dengan letak geografis Kabupaten Bungo yang mencapai luas wilayah 4.659 km^2 dengan petugas Program Keluarga Harapan (PKH) yang terbatas.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini juga terpacu dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pendataan program keluarga harapan. Penelitian yang oleh Muhammad Nur dengan judul “Faktor Sukses Penerapan *E-Government* Dalam Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) di Kabupaten Gowa” merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui faktor sukses penerapan *E-Government* dalam program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) di Kabupaten Gowa. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Royani (2020) berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Masalah Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Batanghari”. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dengan metode pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian adalah mengetahui pelaksanaan pemerintah daerah serta kendala pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian yang oleh Hikmawati Agustina Fremi dengan judul “Evaluasi Penggunaan Basis Data Terpadu Dalam Program Perlindungan Sosial Di Desa Kedungpoh Kecamatan Loano Kabupaten Purwarejo” merupakan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui upaya pemerintah pemerintah desa Kedungpoh dalam pemutakhiran data BDT agar tepat sasaran.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini penulis lakukan dengan fokus yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, dimana terdapat beberapa perbedaan berkaitan dengan konteks pembahasan dimana penelitian terdahulu terfokus kepada penanganan masyarakat miskin yang mudah terjamah dalam program keluarga harapan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan saat ini yaitu terfokus pada pendataan yang terintegrasi kepada masyarakat miskin yang jauh dari jangkauan termasuk Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang pendataan serta validasi penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo.

II.METODE

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan penulis terdorong untuk meneliti perihal pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. Pada penyelesaian penelitian yang akan dilakukan penulis merangkai desain penelitian yang berguna untuk mengarahkan rencana penelitian yang akan dilakukan kedepannya. sehingga, mempermudah penulis dalam menyusun metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, desain penelitian ini disusun karena lebih tepat dalam mendeskripsikan efektivitas pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan suatu masalah. Penelitian ini mengumpulkan, mengolah dan menganalisis masalah-masalah keadaan di lapangan secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan pada permasalahan efektivitas pendataan data Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Pendataan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi

Penulis melakukan analisis data berdasarkan teori Efektivitas Budiani (2007:53) yang meliputi indikator ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.

1. Ketepatan Sasaran

Sasaran bantuan program keluarga harapan melalui SIKS-NG di Kabupaten Bungo sudah berjalan sejak tahun 2019 yang merupakan bentuk upaya pemerintah Kabupaten Bungo dalam mengentaskan kemiskinan pada masyarakat miskin dan rentan. Pelaksanaan program keluarga harapan ini menargetkan keluarga penerima manfaat dengan kriteria keluarga ibu hamil/menyusui, anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun, anak usia sekolah baik sekolah dasar hingga sekolah menengah atas atau yang belum menyelesaikan wajib belajar, lansia mulai dari 60 (enam puluh tahun), dan penyandang disabilitas berat. Untuk melihat sejauhmana program tepat sasaran dengan apa yang sudah ditentukan sebelumnya, seperti pernyataan Kepala dinas sosial, pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Bapak Drs. Yos Army yang mengatakan bahwa:

Sejauh ini kita terus mengupayakan pemerataan data-data penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini ke seluruh wilayah Kabupaten Bungo melalui petugas yang ada di lapangan untuk menjangkau daerah terpencil sekaligus melihat masyarakat miskin dan rentan yang memang sesuai dengan syarat atau kriteria komponen PKH itu sendiri.

Pada Program Keluarga Harapan (PKH) pendataan serta validasi memiliki target sasaran yang merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Keluarga penerima manfaat PKH juga akan masih terbagi dalam kriteria komponen yang telah ditentukan yaitu yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial yang harus sesuai dan tepat agar dapat menjadi penerima manfaat PKH.

Kriteria komponen ini juga menjadi indikator dinas sosial, pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bungo untuk melihat masyarakat miskin dan rentan yang ada di wilayah Kabupaten Bungo yang memenuhi komponen untuk didata menjadi penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) baik yang dilakukan operator desa untuk data awalnya. Penjelasan mengenai hal ini juga akan disampaikan melalui wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada informan.

Kriteria komponen program keluarga harapan merupakan dasar bagi penentuan sasaran atau target pendataan serta validasi yang dilakukan dengan melalui SIKS-NG dimana kriteria komponen dibagi menjadi 3 (tiga) komponen yang harus terdapat pada keluarga miskin dan rentan yang akan mendapatkan bantuan PKH. Kriteria komponen PKH tersebut terdiri atas:

- a. Kriteria komponen kesehatan meliputi:
 1. Ibu hamil/menyusui; dan
 2. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- b. Kriteria komponen pendidikan meliputi:
 1. Anak SD/MI atau sederajat;
 2. Anak SMP/MTs atau sederajat;
 3. Anak SMA/MA atau sederajat; dan
 4. Anak usia enam sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
- c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:
 1. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh tahun); dan
 2. Penyandang disabilitas berat.

Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala dinas sosial, pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang didampingi juga oleh Kepala bidang sosial Ibu Sirlinawati, S.ST, ME yang menyatakan bahwa:

Dasarnya untuk melakukan pendataan atau validasi bagi bantuan program keluarga harapan kita harus menentukan kriteria komponen yang tepat bagi masyarakat yang nantinya akan menerima bantuan PKH. Masyarakat yang dinilai benar-benar tidak mampu dapat membawa KTP atau KK yang nantinya melalui musyawarah desa kepala desa akan menyampaikan data tersebut melalui SIKS-NG *offline* ke bupati/walikota melalui camat yang selanjutnya akan kami verifikasi dan validasi melalui SIKS-NG *online* untuk akhirnya ditetapkan menjadi data terpadu kesejahteraan sosial oleh kementerian sosial. Pendataan ini kami upayakan juga untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil yang ada di Kabupaten Bungo karena memang bisa dipastikan ya banyak di wilayah seperti itu yang masyarakatnya miskin dan rentan yang benar-benar membutuhkan uluran tangan dari pemerintah.

Masyarakat miskin dan rentan yang telah memenuhi kriteria komponen keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) selanjutnya akan mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai pemenuhan dan tanggung jawab menjadi anggota Program Keluarga Harapan (PKH). Disampaikan melalui wawancara kepada Kepala seksi sosial Bapak Mansurman, S.ST menyatakan:

Sebenarnya untuk hak dan kewajiban itu semua memang sudah diatur dalam pedoman PKH. Jadi kita sampaikan melalui pendamping, kemudian pendamping sampaikan kepada KPM program keluarga harapan bahwa ada hak dan kewajiban yang harus mereka lakukan sebagai bentuk komitmen peserta PKH. Untuk hak KPM PKH itu mereka tentunya akan menerima bantuan sosial, kemudian pendampingan sosial, fasilitas kesehatan dan pendidikan serta bantuan pangan, subsidi energi, ekonomi, perumahan dan aset pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Hak itu akan mereka dapatkan tentunya setelah melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka juga tentunya, seperti KPM PKH juga harus diwajibkan memeriksakan kesehatan pada fasilitas layanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan untuk ibu hamil/menyusui dan anak yang berusia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun. KPM PKH juga harus ikut dalam kegiatan belajar mengajar bagi anak usia lanjut sekolah dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85 % (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif sampai wajib belajar 12 tahun serta juga harus mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial dan hadir dalam pertemuan kelompok untuk peningkatan kemampuan keluarga.

Akhirnya jika dilihat dari apa yang telah didapatkan baik dari wawancara ataupun data-data yang penulis dapatkan di lapangan, bisa disimpulkan bahwa ketepatan sasaran program keluarga harapan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) di wilayah Kabupaten Bungo ini sudah tepat pada sasaran dengan melihat apa yang menjadi kriteria komponen PKH yang merupakan masyarakat miskin dan rentan yang ada di wilayah Kabupaten Bungo termasuk wilayah-wilayah yang sulit dijangkau karena akses yang susah untuk dapat menjadi KPM PKH.

2 . Sosialisasi

Usaha ini merupakan peningkatan pemahaman dan penyamaan persepsi bagi pemangku yang menjadi urusan penting pusat dan daerah. Fokus sosialisasi program keluarga harapan tidak hanya pada aspek implementasi dan keberhasilan pelaksanaan PKH, tetapi juga dalam usaha membangun dukungan dan komitmen bantuan sosial program keluarga harapan untuk tetap berjalan tepat dan sesuai sasaran pemerintah dalam membantu masyarakat miskin dan rentan. Sarana sosialisasi ini bisa dilakukan melalui media apa saja karena kecanggihan teknologi saat ini yang lebih berkembang dan sifatnya yang mudah diakses oleh masyarakat. Sosialisasi yang disampaikan berisi muatan informasi tentang mekanisme dan alur pelaksanaan PKH.

Guna mengetahui bentuk sosialisasi seperti apa yang diberikan kepada masyarakat, maka disini penulis telah melakukan wawancara bersama Koordinator kabupaten Bapak Harkam Tujantri, M. Kom yang mengatakan:

Bentuk sosialisasi yang kami berikan itu awalnya kepada perangkat desa dan masyarakat yang secara bertahap kami kumpulkan di Dinas sosial, pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk diberi pengetahuan tentang bantuan sosial yang dicanangkan pemerintah berupa Program Keluarga Harapan (PKH) ini. Dari situ kami paparkan apa yang menjadi syarat PKH, tujuan PKH, bagaimana penyaluran bantuan serta apa yang menjadi hak dan kewajiban PKH, jika masyarakat yang telah terdata di desa. Semua itu kami jelaskan kepada perangkat desa dan masyarakat yang hadir untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat yang ada di desa.

Tujuannya adalah agar calon KPM PKH memiliki pemahaman tentang program keluarga harapan dan kesiapan sebagai penerima manfaat PKH, maka disini tugas pendamping dalam memberikan sosialisasi PKH pada pertemuan awal. Pada pertemuan awal ini akan disampaikan apa yang menjadi tujuan PKH dalam membantu masyarakat miskin dan rentan di Kabupaten Bungo, menjelaskan syarat (*eligible*) menjadi peserta PKH, sanksi dan implikasi apabila KPM PKH tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam program serta mekanisme dan prosedur terkait hal-hal yang berhubungan dengan bantuan program keluarga harapan.

Guna mengetahui pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan Dinas sosial, pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bungo dalam mengenalkan PKH kepada masyarakat di wilayah Bungo penulis mendapatkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Pendamping sosial Ibu Harismawati, S.Pd mengatakan:

Sosialisasi ini kami lakukan pada dasarnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bantuan PKH yang berupaya memberikan bantuan dan mendukung kebutuhan hidup masyarakat miskin dan rentan yang ada di Kabupaten Bungo sesuai dengan kriteria komponen yang telah disampaikan. Target sosialisasi kami biasanya memang menjangkau yang wilayah jauh atau pelosok terlebih dahulu baru, kemudian wilayah terdekat atau yang mudah dijangkau/diakses. Untuk apa saja yang disampaikan ya kami awalnya itu dengan penyampaian kepada ketua kelompok yang saya tunjuk karena ketua kelompok ini yang sehari-hari dekat bersama KPM PKH baru dari situ disampaikan kepada masyarakat melalui pertemuan-pertemuan kelompok yang disampaikan rutin setiap bulan. Jika memang ada peserta baru yang terdaftar dalam SIKS-NG, maka biasanya akan ada penyampaian awal terkait PKH seperti apa tujuannya, syarat PKH, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi atau penyaluran bantuan dan lain sebagainya. Ketua kelompok ini dipilih untuk menjadi tugas perbantuan pendamping yang saat

ini jumlahnya masih kurang untuk menjangkau seluruh PKH di wilayah masing-masing pendamping.

Salah satu dari tujuan sosialisasi tentang PKH dilakukan adalah dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat penerima manfaat PKH dalam memahami prosedur alur pelaksanaan program keluarga harapan yang prioritasnya ditujukan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Daerah terpencil/tertinggal menjadi prioritas penting sosialisasi PKH karena tempatnya yang sulit dijangkau dan masyarakatnya juga yang kurang memahami perkembangan teknologi digital menjadi perhatian khusus dari pemerintah khususnya wilayah Kabupaten Bungo. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas sosial, pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bungo adalah untuk mengupayakan pemberian pemahaman kepada masyarakat miskin dan rentan yang layak menerima bantuan PKH yang meliputi segala aspek yang berkaitan dengan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

3. Tujuan Program Keluarga Harapan

Program keluarga harapan ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengurangi atau menurunkan angka serta memutus rantai kemiskinan masyarakat miskin Kabupaten Bungo untuk dapat lebih mampu meningkatkan taraf hidup dan mengurangi beban biaya kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan di Kabupaten Bungo. Berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan Program Keluarga Harapan ini penulis telah melakukan wawancara bersama Kepala bidang sosial Ibu Sirlinawati, S.ST, ME bahwa:

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini dimaksudkan untuk dapat memberi bantuan berupa keringanan dalam membiayai kebutuhan dasar hidup masyarakat miskin dan rentan yang terdaftar dalam bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan maksud bantuan yang diberikan tersebut dimanfaatkan dengan baik dan optimal oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH untuk memperbaiki kehidupannya di masa depan setelah menerima bantuan PKH yang diberikan.

Salah satu tujuan utama dari program keluarga harapan adalah untuk peningkatan taraf hidup masyarakat yang miskin dan rentan yang terdaftar dalam bantuan PKH. Peningkatan taraf hidup ini dilakukan dengan memberikan bantuan yang dapat berguna memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat penerima PKH. Terkait hal ini penulis bertanya tentang bantuan seperti apa yang diberikan kepada KPM PKH oleh Kepala seksi sosial Bapak Mansurman, S.ST yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

Bantuan PKH ini diberikannya langsung kepada keluarga yang menerima bantuan PKH untuk bantuan secara tunai yang dikirim melalui rekening bank yang mereka punya masing-masing saat telah terdaftar menjadi anggota PKH. Untuk bantuan lainnya itu seperti ada jaminan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan agar mereka mendapatkan manfaat layanan kesehatan yang layak juga, mereka juga berhak mendapatkan bantuan sosial beras sejahtera dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan serta telur. Layanan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar bagi anak usia sekolah dan lanjut sekolah, sehingga dengan begitu mereka akan semangat belajar karena merasa diperhatikan dan tidak dibedakan di masyarakat. Bantuan-bantuan ini memang sudah menjadi hak yang akan didapatkan KPM PKH selama masih memenuhi kriteria komponen untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Keluarga penerima manfaat PKH yang memenuhi syarat (*eligible*) akan menerima saluran bantuan dengan nilai bantuan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, yang mana bantuan terdiri dari bantuan tetap dan bantuan komponen. Bantuan tetap merupakan bantuan stimulan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat, sedangkan bantuan komponen adalah bantuan yang diberikan untuk setiap komponen yang ada dalam setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Jumlah yang diberikan juga akan menyesuaikan dengan tahun berjalan karena hal ini disesuaikan dengan anggaran yang ada dan jumlah untuk setiap penerima bantuan di setiap keluarga hanya empat orang.

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini dicairkan setiap 4 (empat) kali dalam setahun dimana jumlahnya disesuaikan dengan kriteria komponen yang ada dalam satu keluarga penerima manfaat PKH. Artinya, dengan adanya perbedaan komposisi anggota keluarga peserta PKH, maka besar bantuan yang diterima setiap peserta PKH akan bervariasi dan harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturannya. Bantuan tetap per RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin)/KSM (Keluarga Sangat Miskin) per tahun sebesar Rp.300.000,-, untuk KPM berkomponen ibu hamil/menyusui dan anak usia dini sebesar Rp.3.000.000,- per tahun, anak sekolah dasar Rp.900.000,-, anak sekolah menengah pertama Rp.1.500.000,-, anak sekolah menengah atas Rp.2.000.000,-, penyandang disabilitas Rp.2.400.000,- serta lanjut usia sebesar Rp.2.400.000,-.

Kontribusi program keluarga harapan selain dalam bentuk bantuan tunai ataupun non tunai juga ada pendampingan bagi KPM PKH yang diperlukan dalam mempercepat pencapaian tujuan program. Kontribusi pendampingan PKH yang diberikan kepada KPM ini didapatkan penulis melalui wawancara yang dilakukan bersama Pendamping sosial di wilayah Kecamatan Pelepat Ilir Ibu Harismawati, S.Pd yang mengatakan bahwa:

Untuk pelaksanaan pendampingan sendiri itu kami adakan satu bulan sekali jika memang ada waktu dan kesempatan yang pas bersama KPM seperti itu. Biasanya akan ada pertemuan yang diperuntukkan untuk edukasi berkelanjutan yang dapat memberikan pemahaman kepada KPM tentang pentingnya apa itu pendidikan, bagaimana pengasuhan anak, kesehatan keluarga, pengelolaan keuangan keluarga, perlindungan anak, dan pengasuhan lanjut usia serta disabilitas. Ini itu kalau di PKH dinamakan dengan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau yang dikenal dengan *Family Development Session (FDS)* yang merupakan sebuah intervensi perubahan perilaku yang terstruktur. Jadi pendampingan ini kita mulai sejak tahun pertama kepesertaan KPM PKH.

Pelaksanaan pendampingan sebagai langkah untuk memberikan perubahan dan pola pikir Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, masyarakat merasakan sekali dampak dari pendampingan yang diberikan terkait dengan hal tersebut. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH merasakan perubahan yang diberikan merubah pola pikir dan menambah pengetahuan mereka tentang bagaimana untuk mengurus ekonomi keluarga, memikirkan pengasuhan anak yang tepat untuk setiap karakter anak masing-masing, pentingnya kesehatan serta ilmu *parenting* lain yang belum mereka dapatkan sebelum mendapatkan pendampingan bersama bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

4. Pemantauan Program Keluarga Harapan

Pemantauan merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program keluarga harapan dilaksanakan. Kegiatan pemantauan yang merupakan bagian dari kegiatan pengawasan ini dilakukan dengan melihat seperti apa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui SIKS-NG ini berjalan dalam sebuah sistem yang menyatu dengan seluruh aspek pelaksanaan program. Pemantauan ini sebaiknya dilakukan secara terus-menerus baik saat proses perencanaan program keluarga harapan maupun tentang bagaimana pelaksanaan program keluarga harapan ini berjalan.

Pengawasan ini dilakukan oleh tim pelaksana di Kabupaten Bungo yang ada di lapangan yang terdiri dari Koordinator kabupaten dan pendamping PKH. Pengawasan ini dapat dilakukan saat kegiatan PKH berlangsung atau bisa juga dengan melihat dari perkembangan pelaksanaan PKH dalam waktu tertentu dan untuk melihat bagaimana pengawasan PKH penulis telah melakukan wawancara dengan bersama dengan Pendamping sosial Ibu Harismawati, S.Pd yang mengatakan:

Tujuan pengawasan itu ya biar semua yang dilakukan dalam program keluarga harapan itu terpantau dan berjalan sesuai dengan yang semestinya

begitu. Hal ini juga kami lakukan untuk mengetahui dan memastikan PKH ini berjalan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta juga memberikan upaya perbaikan-perbaikan dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Tujuan adanya pengawasan ini memang sekaligus juga untuk melihat sudah tepat atau belum sasaran dari penerima bantuan PKH yang ada di Kabupaten Bungo karena kadang juga saat pengawasan dilakukan di lapangan ini lah akan ada saja data yang ditemukan bahwa masyarakatnya bisa dikatakan tidak layak lagi untuk menerima bantuan karena sudah bisa dikategorikan mampu atau ada juga penerima PKH yang sudah meninggal, tetapi masih terdata dalam penerima bantuan PKH yang mungkin saja masih diwakilkan oleh anak atau walinya yang lain. Hal ini itu terjadi biasanya karena kurang koordinasi antara pendamping dengan operator untuk memutakhirkan data penerima PKH di desa begitu.

Kegiatan pemantauan Program Keluarga Harapan (PKH) ini mempunyai tujuan untuk mengamati bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dilakukan di lapangan, sudah sebaik mana untuk bisa dikatakan berhasil dalam memenuhi dan membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dan rentan yang ada di wilayah Kabupaten Bungo dalam membiayai kebutuhan dasar mulai dari pendidikan dan kesehatan untuk mengubah kehidupan masyarakat miskin dan rentan yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi lebih baik.

3.3 Kendala dalam Efektivitas Pendataan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Pelepat Iilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi

1. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang ada di lapangan.

Kurang atau terbatasnya sumber daya manusia yang ada di lapangan menjadi hambatan Dinas Sosial, P2KB dan P3A dalam melaksanakan pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) terkhusus di Kecamatan Pelepat Iilir Kabupaten Bungo. Efektifnya dalam kegiatan pendataan masyarakat miskin dan rentan penerima PKH ini minimal untuk setiap desa memiliki petugas data yang khusus mengurus data masyarakat miskin dan rentan di satu wilayah desa. Hal ini diperlukan mengingat jarak antar desa satu dengan desa lainnya yang mempunyai jarak berjauhan membuat pendataan PKH belum berjalan efektif sesuai dengan target data dari desa ke desa yang sudah ditentukan, sehingga membuat waktu yang dibutuhkan juga lebih lama dalam pemutakhiran data. Di dapat disimpulkan dari 141 desa hanya ada 54 desa yang memiliki operator karena untuk satu kecamatan juga hanya dua hingga tiga orang operator Program Keluarga Harapan (PKH), oleh karena itu untuk Kabupaten Bungo sendiri masih kekurangan sumber daya manusia yang ahli di lapangan.

2. Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana yang ada.

Kegiatan pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) yang saat ini sudah langsung terintegrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui SIKS-NG membuat petugas di lapangan juga dituntut cepat terkait adanya perubahan data, baik penambahan atau penghapusan data penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di lapangan untuk segera dilaporkan, sehingga akan selalu ada pemutakhiran data PKH. Fasilitas sarana dan prasarana untuk saat ini yang dimiliki oleh Dinas Sosial, P2KB dan P3A masih dirasa kurang untuk melakukan pendataan PKH.

3.4 Upaya Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Pendataan PKH di Kabupaten Bungo

Upaya Dinas sosial, pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bungo dalam melaksanakan peran terkait pendataan program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo untuk saat ini adalah dengan mengoptimalkan sumber daya manusia ahli di lapangan, yaitu merekrut sendiri langsung asisten petugas pendataan PKH di lapangan untuk membantu kegiatan pendataan yang tidak perlu menggunakan sistem seperti, memfoto rumah dan kartu keluarga, mewancarai masyarakat miskin dan rentan tentang keperluan yang belum dapat dipenuhi.

Asisten petugas ini dipilih langsung oleh petugas yang ada di lapangan yang diketahui dan dirasa dapat membantu pelaksanaan pendataan Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga petugas hanya perlu izin atau menyampaikan ke pendamping sosial atau koordinator kabupaten/wilayah. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi fasilitas sarana dan prasarana yang kurang saat ini di dinas sosial, pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah dengan menanggulangi secara mandiri fasilitas milik pribadi yang dimiliki oleh petugas, baik dengan menggunakan komputer, *laptop* ataupun *handphone* yang dirasa dapat membantu tugas kegiatan pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Kecamatan Pelepat Ilir. Banyak petugas pendataan yang di lapangan ketika ditemui oleh penulis, kebanyakan menggunakan fasilitas milik pribadi mereka.

Hal ini dilakukan karena memang untuk jumlah sarana dan prasarana di Dinas sosial, pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini kurang atau terbatas. Petugas akhirnya berinisiatif untuk

menggunakan fasilitas pribadi dalam membantu kegiatan pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) di lapangan. Melihat dari upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas sosial, pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) ini memang belum cukup efektif, karena jika mengamati kegiatan pendataan PKH terkhusus di wilayah Kecamatan Pelepat Iilir masih ditemui data-data masyarakat miskin yang tidak sesuai dengan kriteria komponen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) karena pemutakhiran data yang jarang dilakukan secara berkala, sehingga data tidak terbaru membuat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tidak lagi tepat sasaran yang diharuskan. Hal ini membuat penerima bantuan Program Keluarga Harapan tidak lagi sesuai dengan kriteria komponen PKH. Akhirnya perlu adanya pemantauan kegiatan pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk melihat keadaan langsung di lapangan dengan apa yang tertulis dalam sistem DTKS.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian yang oleh Muhammad Nur dengan judul “Faktor Sukses Penerapan *E-Government* Dalam Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) di Kabupaten Gowa” merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui faktor sukses penerapan *E-Government* dalam program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) di Kabupaten Gowa. Hasil yang didapatkan di lapangan adalah pemerintah daerah dengan pemerintah desa saling berkoordinasi dan bersinergi dengan baik dalam meningkatkan pemutakhiran data di Kabupaten Gowa. Keberhasilan dalam pelaksanaan *E-Government* melalui program SIKS-NG di Kabupaten Gowa ini terlihat dari peningkatan pemutakhiran data yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Ida Royani (2020) berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Masalah Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Batanghari”. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dengan metode pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian adalah mengetahui pelaksanaan pemerintah daerah serta kendala pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan hasil penelitian di lapangan oleh peneliti didapatkan informasi penerima bantuan sosial PKH dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial masih banyak menemui kekeliruan. Pada dasarnya implementasi PKH di Desa Teluk Kecamatan Pemayang Kabupaten Batang Hari berjalan tetapi belum maksimal. Faktor pendukung dalam PKH yaitu sumber material yang cukup untuk mendukung program tersebut sedangkan faktor penghambatnya adalah konflik yang terjadi pada individu karena pendamping yang belum memahami prosedur penerima bantuan sosial.

Penelitian yang oleh Hikmawati Agustina Fremi dengan judul “Evaluasi Penggunaan Basis Data Terpadu Dalam Program Perlindungan Sosial Di Desa Kedungpoh Kecamatan Loano Kabupaten Purwarejo” merupakan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui upaya pemerintah pemerintah desa Kedungpoh dalam pemutakhiran data BDT agar tepat sasaran. Hasil yang didapatkan di lapangan adalah adanya bantuan yang tidak tepat sasaran warga dengan ekonomi baik mendapatkan bantuan sosial sedangkan warga dengan ekonomi di bawahnya belum terdata.

IV. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang telah dilakukan, baik melalui wawancara bersama informan, observasi bersama di lapangan serta hasil dokumentasi yang didapatkan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa efektivitas pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pelepat Iilir Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas pendataan program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pelepat Iilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi masih terdapat kendala terkait dengan pendataan PKH yang masih terbatas dengan petugas ahli di lapangan dan sarana prasarana yang belum mendukung jumlahnya.
2. Kendala yang dialami dalam efektivitas pendataan program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pelepat Iilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi diantaranya sebagai berikut:
 - a. Kurangnya sumber daya manusia yang ada di lapangan.
 - b. Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana
3. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo dalam mengoptimalkan pendataan program keluarga harapan di Kecamatan Pelepat Iilir yaitu:
 - a. Merekrut sendiri langsung asisten petugas pendataan PKH di lapangan untuk membantu kegiatan pendataan yang tidak perlu menggunakan sistem seperti, memfoto rumah dan kartu keluarga, mewancarai masyarakat miskin dan rentan tentang keperluan yang belum dapat dipenuhi.
 - b. Menanggulangi secara mandiri fasilitas milik pribadi yang dimiliki oleh petugas, baik dengan menggunakan komputer, *laptop* ataupun *handphone* yang dirasa dapat membantu tugas kegiatan pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Kecamatan Pelepat Iilir. Banyak petugas pendataan yang di lapangan ketika ditemui oleh penulis, kebanyakan menggunakan fasilitas milik pribadi.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo sesuai dengan teori Budiani (2007:53).

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan efektivitas pendataan PKH yang lebih mendalam.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai efektivitas pendataan program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo, maka dapat direkomendasikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi saran diantaranya:

1. Pembuatan madding untuk jadwal rutin turun ke lapangan yang dikoordinasikan pada tim pelaksana secara keseluruhan.
2. Diajukan dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bungo sebagai bentuk tanggung jawab daerah dalam mengentaskan kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan dalam kehidupan sehari-harinya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diucapkan penulis kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan lancar. Selanjutnya diucapkan terimakasih kepada orang tua yang selalu senantiasa memberikan dukungan baik secara moril dan material dan mendoakan kelancaran setiap langkah perjuangan serta memberikan panutan yang baik. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing atas segala ilmu dan arahan dalam membantu menyelesaikan penelitian ini. Kepada pihak-pihak terkait yang berada dalam lingkungan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian ini serta kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendoakan kelancaran penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Amela,Rizcah.2015.*Efektivitas Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan*.Skripsi.Tidak diterbitkan,Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin: Makassar

Baria,Khaerul.2019.*Efektivitas Pelayanan Kartu Macca*.Skripsi.Tidak diterbitkan.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah: Makassar

Kharisma,Dipta.,dan Tri Yuningsih.2015.*Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)*. Skripsi Tidak diterbitkan.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro: Semarang

